



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALAMSYAH PERKESI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **198046**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.255.000.000**

1. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BONE, Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 50.000 m2 di KAB / KOTA WAJO, Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA WAJO, Rp. 200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 550.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 479 m2/101 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **230.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.



90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	177.000.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	187.064.845
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.849.064.845
III. HUTANG	Rp.	175.997.561
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.673.067.284

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.